

Intelijen Ekonomi: Katalisator Kemajuan Pembangunan dan Daya Saing Daerah

Economic Intelligence: A Catalyst for Regional Development Progress and Competitiveness

Herie Saksono  ^{1,2}

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Mataram, Indonesia 

² Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Indonesia 

<https://doi.org/10.46891/kainawa.7.2025.97>

Abstrak

Transformasi pembangunan daerah pada era volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA) menuntut pergeseran mendasar dari keunggulan komparatif statis menuju keunggulan kompetitif yang bersifat dinamis dan berbasis pengetahuan. Dalam praktiknya, pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural berupa fragmentasi data antarorganisasi perangkat daerah, lemahnya integrasi lintas-aktor, inersia birokrasi, dan keterbatasan kapasitas analitis dalam mendeteksi risiko dan peluang ekonomi secara dini. Penelitian ini bertujuan menganalisis revitalisasi peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) dari institusi penjaga stabilitas politik menjadi simpul utama intelijen ekonomi daerah yang berfungsi sebagai "Sistem Saraf Pusat" (SSP) pemerintahan, sekaligus mengkaji operasionalisasi model Dodeca-Helix sebagai infrastruktur kolaborasi pengetahuan pembangunan wilayah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang dikontekstualisasikan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis Intelijen Badan Kesbangpol Kota Bandung tahun 2025. Hasil studi menunjukkan bahwa kegagalan deteksi dini terhadap gejolak ekonomi daerah terutama disebabkan oleh isolasi informasi dan absennya mekanisme intelijen terpadu. Revitalisasi Badan Kesbangpol sebagai pusat pertukaran dan analisis informasi strategis menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat fungsi pengawasan strategis, keamanan ekonomi, dan strategi pengaruh daerah. Kontribusi utama studi ini terletak pada redefinisi kelembagaan Badan Kesbangpol sebagai SSP intelijen ekonomi daerah serta pemanfaatan model Dodeca-Helix sebagai jaringan sensor cerdas pemerintahan. Intelijen Ekonomi ditegaskan sebagai prasyarat fundamental bagi resiliensi, kedaulatan wilayah, dan daya saing daerah dalam konteks persaingan geoekonomi global. Studi merekomendasikan 5 (lima) langkah strategis-kompetitif agar lebih mengakselerasi pembangunan daerah yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata Kunci

Intelijen Ekonomi; Dodeca-Helix; Sistem Saraf Pusat; Badan Kesbangpol; Daya Saing Daerah.

Abstract

Regional development transformation in the era of volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA) demands a fundamental shift from static comparative advantage to dynamic, knowledge-based competitive advantage. In practice, local governments in Indonesia still face structural issues such as data fragmentation across regional government agencies, weak cross-actor integration, bureaucratic inertia, and limited analytical capacity to detect economic risks and opportunities early. This study aims to analyze the revitalization of the National and Political Unity Agency (Badan Kesbangpol) from a political stability-maintaining institution to a central hub for regional economic intelligence, serving as the "Central Nervous System" (CNS) of government. It also examines the operationalization of the Dodeca-Helix model as a collaborative infrastructure for regional development knowledge. This study uses a qualitative approach through library research contextualized with the implementation of the Bandung City Kesbangpol Agency's 2025 Intelligence Technical Guidance. The results indicate that the failure to detect regional economic turmoil early is primarily due to information isolation and the absence of an integrated intelligence mechanism. Revitalizing the National Unity and Politics Agency (Badan Kesbangpol) as a center for strategic information exchange and analysis is an urgent need to strengthen its strategic oversight function, economic security, and regional influence strategies. The main contribution of this study lies in the institutional redefinition of the National Unity and Politics Agency as a regional economic intelligence center (SSP) and the utilization of the Dodeca-Helix model as a government intelligence sensor network. Economic intelligence is emphasized as a fundamental prerequisite for resilience, regional sovereignty, and regional competitiveness in the context of global geoeconomic competition. The study recommends five strategic-competitive steps to further accelerate adaptive and sustainable regional development.

Keywords

Economic Intelligence; Dodeca-Helix; Central Nervous System; National Unity and Politics Agency; Regional Competitiveness.

Penulis korespondensi: Herie Saksono (herie.saksono26@gmail.com)

Hak cipta: © 2025 Penulis.

Karya ini dilisensikan di bawah lisensi **Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional** 

Bagaimana mengutip artikel ini: Saksono, H. (2025). Intelijen Ekonomi: Katalisator Kemajuan Pembangunan dan Daya Saing Daerah. *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, 7(2), 143–152. <https://doi.org/10.46891/kainawa.7.2025.97>

1. Pendahuluan

Perkembangan abad ke-21 ditandai oleh pergeseran lanskap strategis global dari dominasi geopolitik berbasis teritorial menuju persaingan geoekonomi yang menempatkan instrumen ekonomi, teknologi, dan informasi sebagai sumber utama kekuasaan dan kedaulatan (Marín, 2025; Wijaya & Jayasuriya, 2024). Dalam konteks ini, daerah otonom tidak lagi beroperasi dalam ruang kompetisi yang bersifat lokal atau nasional semata, melainkan terhubung langsung dengan dinamika global yang asimetris. Daerah dituntut untuk mampu menarik investasi, mengamankan aset strategis, serta mempertahankan dan mengembangkan talenta unggul di tengah kompetisi lintas wilayah dan lintas negara (Kapitsinis dkk., 2021).

Paradigma pembangunan yang bertumpu pada keunggulan komparatif statis—seperti ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah atau tenaga kerja berbiaya rendah (murah)—semakin kehilangan relevansinya. Keunggulan tersebut mudah ditiru dan rentan terhadap fluktuasi pasar global. Sebaliknya, keunggulan kompetitif yang bersifat dinamis, berbasis pada penguasaan informasi, inovasi berkelanjutan, dan kemampuan adaptasi kelembagaan, menjadi determinan utama keberhasilan pembangunan daerah (Saksono, 2012). Dalam kerangka inilah intelijen ekonomi memperoleh signifikansinya sebagai proses sistematis pengelolaan informasi strategis untuk mengantisipasi risiko, mengamankan kepentingan ekonomi, dan memanfaatkan peluang pembangunan secara optimal. Intelijen Ekonomi (*Economic Intelligence*) menjadi vital: bukan sekadar intelijen klasik yang berfokus pada ancaman militer, melainkan manajemen strategis informasi untuk mengantisipasi risiko ekonomi, mengamankan aset strategis, dan memenangkan peluang pasar (Adami, 2019).

Namun demikian, implementasi intelijen ekonomi pada level pemerintah daerah masih relatif terbatas. Fungsi pengumpulan dan analisis informasi strategis cenderung tersebar dalam silo birokrasi yang tidak terintegrasi, bahkan fungsi vital ini sering kali absen atau terfragmentasi dalam silo-silo organisasi yang tertutup, menyisakan celah kerentanan serius bagi stabilitas ekonomi wilayah, sehingga menghambat pembentukan wawasan kolektif yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan strategis (Saksono dkk., 2023). Literatur terkini mengungkapkan kesenjangan signifikan dalam pemahaman intelijen ekonomi di level pemerintah daerah. Mayoritas studi yang ada cenderung berfokus pada aspek teknokratik transformasi digital atau konsep *Smart City* sebagai solusi tunggal, sambil mengabaikan dimensi “intelijen” atau kapabilitas kognitif birokrasi dalam mengolah data mentah menjadi wawasan strategis yang dapat ditindaklanjuti (Aminah & Saksono, 2021).

Di sisi lain, kajian mengenai ekosistem inovasi daerah melalui pendekatan *helix*—baik *Triple Helix* maupun *Quadruple Helix*—umumnya menempatkan pemerintah, akademisi, bisnis, dan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Meski demikian, peran institusi yang secara tradisional berfungsi dalam ranah stabilitas politik dan keamanan, khususnya Badan Kesbangpol, masih jarang dibahas dalam konteks orkestrasi intelijen ekonomi daerah. Padahal, secara kelembagaan Badan Kesbangpol memiliki posisi strategis dalam pengelolaan informasi lintas sektor dan pemantauan dinamika sosial-politik yang berdampak langsung terhadap stabilitas dan kinerja ekonomi daerah (Saksono, 2024). Implikasinya, terdapat kekosongan teoritis dan empiris mengenai bagaimana peran lembaga yang secara tradisional mengurus stabilitas politik dapat direvitalisasi fungsinya menjadi pendorong utama intelijen ekonomi daerah.

Studi ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana merevitalisasi peran Badan Kesbangpol dari penjaga stabilitas politik di daerah menjadi Sistem Saraf Pusat (SSP) intelijen ekonomi daerah, bagaimana model Dodeca-Helix dapat dioperasionalkan untuk

mendukung fungsi intelijen ekonomi, dan strategi apa yang diperlukan untuk mentransformasi data administratif menjadi produk intelijen strategis yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Secara spesifik, studi ini bertujuan merevitalisasi peran kelembagaan Badan Kesbangpol sebagai koordinator utama (*hub*) dalam sistem deteksi dini dan intelijen ekonomi daerah, merumuskan mekanisme kerja kolaboratif berbasis model *Dodeca-Helix* dalam ekosistem intelijen, serta menyusun kerangka strategis implementasi intelijen ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan resiliensi dan daya saing daerah di tengah gejolak geoekonomi.

Secara teoretis, studi ini berpijak pada dua teori utama: *Systemic Competitiveness* dan *Collaborative Governance*. Pemahamannya bahwa daya saing tidak lahir dari satu aktor, melainkan dari hasil interaksi sistemis kompleks antara faktor mikro, meso, makro, dan meta, menjadi fondasi analisis (Saksono, 2020). Teori ini pun dipadukan dengan prinsip *Collaborative Governance* yang menekankan pentingnya kepemimpinan fasilitatif dan konsensus antaraktor dalam mengelola kompleksitas pembangunan wilayah. Pada level teori menengah, studi mengadopsi konsep *Economic Intelligence* (intelijen ekonomi) dan *Territorial Intelligence* (intelijen teritorial) sebagai lensa analitis untuk memahami siklus pengumpulan, analisis, dan diseminasi informasi strategis di tingkat wilayah (García-Madurga dkk., 2020). Pada tataran operasional, model *Dodeca-Helix* dan metafora Sistem Saraf Pusat (SSP) digunakan sebagai pisau analisis untuk memetakan interaksi 12 aktor pembangunan dan merekonstruksi fungsi Badan Kesbangpol dalam ekosistem pemerintahan daerah.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat integratif dan kontekstual. Analisis tidak hanya bertumpu pada telaah literatur ilmiah, tetapi juga dikaitkan dengan konteks empiris disertai observasi selama pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Intelijen Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bandung pada 30–31 Oktober 2025 (Almubaroq dkk., 2025). Kegiatan tersebut diposisikan sebagai lokus empiris untuk memahami dinamika perubahan paradigma birokrasi daerah dalam mengintegrasikan aspek stabilitas keamanan dengan agenda pembangunan ekonomi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan diskusi substantif yang berlangsung dalam rangkaian kegiatan bimbingan teknis. Dokumen perencanaan, kerangka acuan kerja (KAK), serta notula diskusi diperlakukan sebagai artefak kebijakan yang merefleksikan arah transformasi konseptual peran Badan Kesbangpol. Data sekunder diperoleh dari publikasi ilmiah bereputasi pada pangkalan data Scopus, Web of Science, dan SINTA untuk periode 2020–2025, dengan fokus pada tema intelijen ekonomi, intelijen teritorial, dan model *Dodeca-Helix*.

Analisis data mengacu pada siklus intelijen yang meliputi tahap pengumpulan, evaluasi, analisis, dan diseminasi informasi (Chiru & Ungureanu, 2021). Seluruh temuan kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka *Dodeca-Helix* dengan menempatkan Badan Kesbangpol sebagai Sistem Saraf Pusat (SSP) yang mengoordinasikan aliran informasi lintas aktor dan sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan ini memungkinkan penelitian bergerak dari deskripsi administratif menuju pemahaman makna substantif mengenai transformasi kelembagaan dalam konteks intelijen ekonomi daerah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Revitalisasi Badan Kesbangpol sebagai Sistem Saraf Pusat (SSP)

Temuan utama penelitian ini menunjukkan perlunya redefinisi peran Badan Kesbangpol dalam struktur pemerintahan daerah. Secara tradisional, Badan Kesbangpol dipandang dan dipersepsikan sebagai institusi yang berfokus pada pengelolaan ideologi, politik, dan organisasi kemasyarakatan atau ormas (Saksono, 2019). Berdasarkan kondisi realistik, studi ini mengusulkan transformasi peran dengan menempatkan Badan Kesbangpol sebagai “Sistem Saraf Pusat (SSP)” bagi pemerintahan daerah dalam kerangka intelijen ekonomi.

Metafora SSP mengacu pada fungsi sistem saraf dalam tubuh manusia yang menerima rangsangan dan sinyal sensorik dari seluruh tubuh, memprosesnya (informasi) melalui analisis kognitif, dan mengirimkan serta mengoordinasikan sinyal motorik untuk respons secara terpadu (Hicham & Hamza, 2025). Analoginya dalam pemerintahan daerah adalah: 1) Input Sensorik: Badan Kesbangpol menerima aliran data dari seluruh aktor *Dodeca-Helix*; 2) Proses Kognitif: Badan Kesbangpol melakukan analisis intelijen terpadu untuk mendeteksi ancaman dan peluang; dan 3) Output Motorik: Badan Kesbangpol merekomendasikan tindakan strategis kepada Kepala Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan selanjutnya mengoordinasikan respons lintas-organisasi perangkat daerah. Dengan kata lain, dalam konteks pemerintahan daerah, fungsi ini diwujudkan melalui tiga mekanisme utama: 1) penerimaan data dan informasi dari seluruh aktor *Dodeca-Helix*; 2) pengolahan informasi melalui analisis intelijen terpadu; dan 3) penyampaian rekomendasi strategis kepada kepala daerah dan organisasi perangkat daerah terkait. Dengan demikian, Badan Kesbangpol berperan sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan stabilitas politik dengan keberlanjutan dan ketahanan ekonomi daerah.

Transformasi ini menuntut perubahan fokus dari pendekatan “Intelijen Keamanan” yang lebih berorientasi kepada deteksi terorisme, separatisme, dan/atau hal lain yang serupa menuju kepada “Intelijen Kesejahteraan” atau Intelijen Ekonomi yang menekankan pada perlindungan dan penguatan kesejahteraan masyarakat (Seigle dkk., 2008). Hal ini mencakup deteksi dini terhadap konflik sumber daya, fluktuasi harga komoditas, maupun aktivitas ekonomi yang berpotensi mengganggu iklim investasi, pemantauan aktivitas LSM/NGO asing yang mungkin memiliki agenda terselubung terhadap komoditas strategis, menjadi bagian integral dari tugas, fungsi, dan peran Badan Kesbangpol dalam kerangka baru ini (Balanda & Cherniak, 2022). Dengan demikian, keamanan ekonomi menjadi prasyarat kesejahteraan, dan intelijen adalah jembatan yang menghubungkan keduanya.

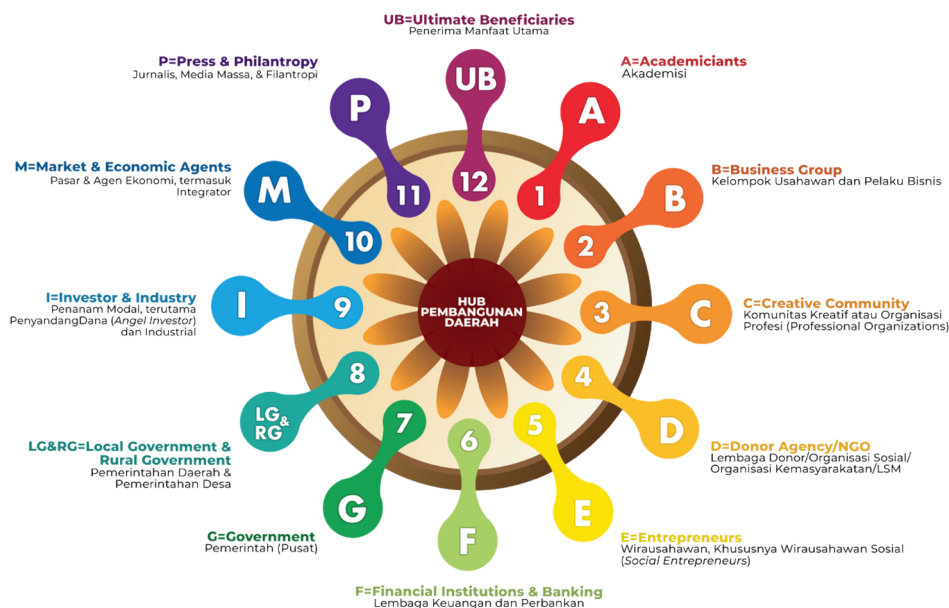
3.2. Model *Dodeca-Helix* & Fungsi Intelijen Ekonomi: Dari Keunggulan Komparatif Menuju Keunggulan Kompetitif Teritorial

Paradigma pembangunan daerah Indonesia dihadapkan pada tantangan global yang kompleks dan memerlukan pembenahan komprehensif. Model pembangunan yang semata-mata mengandalkan keunggulan komparatif—kekayaan sumber daya alam dan tenaga kerja murah—tidak lagi relevan dalam menghadapi dinamika geoekonomi era VUCA yang *volatile*, kompleks, dan ambigu (Dima, 2021). Daerah-daerah yang berhasil mengakselerasi pertumbuhan ekonominya adalah mereka yang mampu bertransformasi menuju keunggulan kompetitif yang berbasis penguasaan data, informasi, teknologi, dan kecepatan adaptasi inovasi. Di sinilah sejatinya eksistensi Intelijen Ekonomi wajib hadir, bukan sebagai instrumen pelengkap, melainkan sebagai fungsi manajerial inti (*core managerial*) yang menentukan kedaulatan dan kemakmuran suatu wilayah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa model kolaborasi konvensional belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas ekosistem pembangunan daerah. Analisis terhadap sistem pembangunan daerah menunjukkan tiga temuan fundamental. Pertama, keterbatasan model kolaborasi konvensional (*Triple Helix* dan *Quadruple Helix*) dalam memetakan kompleksitas ekosistem inovasi daerah, khususnya di negara kepulauan dengan karakteristik sosial-budaya unik seperti Indonesia (Broström, 2011). Model-model konvensional ini terbukti meninggalkan “lubang hitam” yang tak terpetakan: aktor-aktor krusial seperti lembaga keuangan, media, agen pasar, dan komunitas kreatif sering terpinggirkan dari diskursus perencanaan pembangunan utama. Kedua, fenomena “*silo mentality*” yang justru menghasilkan fragmentasi data/informasi antarorganisasi perangkat daerah yang berdampak pada lemahnya integrasi kebijakan lintas sektor (Nuryana & Junaidi, 2025). Setiap aktor bekerja dalam ruang lingkup tertutup, menciptakan asimetri informasi yang menghalangi terbentuknya intelijen kolektif. Dinas perizinan tidak terintegrasi dengan data pajak, keduanya terputus dari data ketenagakerjaan, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki “satu data” yang valid untuk pengambilan keputusan strategis. Ketiga, urgensi adopsi model *Dodeca-Helix* yang lebih *robust* untuk mengintegrasikan 12 pemangku kepentingan dalam satu “Sistem Saraf Pusat” pemerintahan.

Model *Dodeca-Helix* menawarkan kerangka kerja yang lebih komprehensif karena telah mengintegrasikan 12 aktor strategis dalam *hub* pembangunan daerah, di mana masing-masing aktor secara institusional memiliki peran spesifik, unik, dan tak tergantikan dalam sinergitas ekosistem intelijen ekonomi daerah (Saksono, 2024). Keberhasilan operasionalisasi intelijen ekonomi sangat bergantung pada kualitas interaksi antaraktor dalam ekosistem ini. Aktor-aktor tersebut mencakup akademisi (A) sebagai “penyedia wawasan intelektual strategis” yang memproses data mentah menjadi pengetahuan; sektor bisnis (B) sebagai “sensor pasar” yang adaptif memberikan intelijen *real-time* tentang preferensi konsumen dan pergerakan pesaing; komunitas kreatif (C) selaku “pencipta nilai” dan sebagai “sumber intelijen sosial” melalui *crowdsourcing* partisipatif; pemerintah pusat (G) sebagai “penyelaras kebijakan” makro; pemerintah daerah (LG) sebagai “orkestrator jaringan”; media (P) sebagai “penjaga narasi”; lembaga keuangan dan perbankan (F) sebagai “pemantau arus modal dan jumlah uang beredar serta kondisi moneter dalam negeri”; investor & industri (I) sebagai “penguji risiko”; wirausahawan (E) sebagai “agitator inovasi”; agen pasar (M) sebagai “integrator rantai pasok”; dan lembaga donor/NGO (D) sebagai “pengisi kesenjangan” dan pembawa praktik terbaik internasional agar agenda kolaboratif yang dibangun dapat menghasilkan *outcome* kesejahteraan yang langsung dirasakan masyarakat, terutama mereka yang bertindak selaku penerima manfaat utamanya (UB) sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1 (Saksono, 2025).

Interaksi antaraktor dalam model *Dodeca-Helix* menghasilkan kecerdasan kolektif yang dapat dijadikan fondasi intelijen ekonomi daerah. Namun, keberhasilan model ini sangat ditentukan oleh kualitas kepercayaan, modal sosial, integritas aktor, dan mekanisme pertukaran pengetahuan yang terbuka. Mekanisme interaksi dalam model ini bergeser dari kompetisi murni menuju “koopetisi”—kolaborasi dalam menciptakan nilai sambil tetap berkompetisi dalam efisiensi (Squalli & Wilson, 2014). Studi kasus menunjukkan bagaimana interaksi antara komunitas kreatif (penenun tradisional), akademisi (desainer motif digital), dan pemerintah daerah (fasilitator HAKI) mampu mengangkat nilai jual produk lokal ke pasar internasional. Tanpa salah satu elemen ini, ekosistem akan stagnasi atau runtuh. Kunci kesuksesan terletak pada kualitas modal sosial dan kepercayaan (*trust*) yang memungkinkan



Gambar 1. Dodeca-Helix: 12 Pemangku Kepentingan Hub Pembangunan Daerah

aliran pengetahuan lintas batas institusional tanpa hambatan. Maksudnya, dalam kerangka intelijen ekonomi, *Dodeca-Helix* berfungsi sebagai jaringan sensor yang menangkap sinyal ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi secara *real time*. Informasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga prediktif dan strategis, sehingga memungkinkan pemerintah daerah merespons dinamika eksternal secara lebih adaptif dan proaktif.

3.3. Strategi Transformasi Operasional Intelijen Ekonomi Daerah

Penelitian ini mengidentifikasi tiga pilar utama operasionalisasi intelijen ekonomi daerah, yaitu: pengawasan strategis, keamanan ekonomi, dan strategi pengaruh. Pengawasan strategis (*strategic surveillance*) berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap perubahan lingkungan global yang berdampak lokal, termasuk dinamika perdagangan internasional dan perkembangan teknologi disruptif (Hind & Outmane, 2024). Keamanan ekonomi (*economic security*) adalah fungsi defensif untuk melindungi aset vital daerah dari ancaman asimetris seperti spionase industri, pencurian kekayaan intelektual, serangan siber dan sabotase infrastruktur kritis. Dengan kata lain, keamanan ekonomi lebih fokus pada perlindungan aset strategis daerah (Hind & Outmane, 2024). Sebab, era interkoneksi digital masif telah mengubah lanskap ancaman dan memerlukan tingkat kewaspadaan prima, di mana serangan *ransomware* terhadap infrastruktur Smart City dapat melumpuhkan layanan publik vital dalam hitungan jam.

Sementara itu, strategi pengaruh diarahkan untuk memperkuat citra dan daya tarik daerah melalui pemasaran wilayah berbasis data dan bukti empiris (Mostaque, 2025). Strategi pengaruh dan pemasaran wilayah (*influence and territorial marketing*) adalah fungsi ofensif untuk memenangkan persaingan global melalui diplomasi ekonomi berbasis bukti dan kontra-narasi yang kuat terhadap kampanye negatif (Mostaque, 2025). Kepala daerah tidak hanya administrator, tetapi juga “duta besar ekonomi” (*economic ambassador*) yang melobi pemerintah (pusat), pemerintah daerah di negara tetangga, hingga investor asing dengan proposisi nilai yang kredibel dan berbasis data.

Berdasarkan studi kepustakaan, dalam konteks transformasi intelijen ekonomi dapat dilakukan komparasi terhadap entitas maju seperti Singapura, Irlandia, dan Jepang. Terungkap kesenjangan kapabilitas yang mencolok, sekaligus menawarkan peta jalan perbaikan bagi daerah Indonesia. Singapura, melalui Economic Development Board (EDB), mempraktikkan Intelijen Ekonomi pada level tertinggi dengan strategi “Queen Bee” yang mengidentifikasi dan secara proaktif mendekati perusahaan pemimpin pasar global dengan proposal investasi yang sangat spesifik, didukung riset intelijen mendalam. Integrasi total antara kebijakan investasi, pendidikan vokasi, dan imigrasi Singapura menunjukkan responsivitas yang tidak dimiliki mayoritas daerah di Indonesia—ketika EDB mendeteksi tren, Kementerian Pendidikan langsung menyesuaikan kurikulum, dan Imigrasi membuka visa khusus.

Irlandia melalui Industrial Development Agency (IDA) yang berhasil mentransformasi negara agraris miskin menjadi “Celtic Tiger” melalui jejaring intelijen pasar global yang masif, dengan kantor perwakilan di seluruh dunia berfungsi sebagai pos pengumpul informasi *real-time* tentang sentimen investor (O’Leary, 2015). Jepang melalui METI (Ministry of Economy, Trade, and Industry) melakukan pergeseran paradigma dari *Just-in-Time* (JiT) menuju *Just-in-Case* (JiC), dengan fokus pada ketahanan rantai pasok material kritis melalui kolaborasi ahli sektor swasta-pemerintah (Armstrong & Urata, 2023). Pembelajaran dari praktik terbaik global ini menunjukkan bahwa operasionalisasi Intelijen Ekonomi menuntut penghapusan dikotomi antara fungsi promosi investasi dan fungsi keamanan—keduanya adalah dua sisi dari mata uang kedaulatan ekonomi.

Realitas empiris di daerah Indonesia menunjukkan disparitas tajam dengan standar global. Berdasarkan studi Saksono dkk. (2023) serta Saksono dan Utami (2024) di daerah berkembang seperti Provinsi Gorontalo, masih ditemukan permasalahan mendasar berupa akurasi data dan eksistensi satu data untuk pembangunan daerah, problematika ego sektoral, dan bahkan ketiadaan integrasi sistem dan interoperabilitas data antarperangkat daerah. Sebaliknya, inisiatif Badan Kesbangpol Kota Bandung dengan agenda Bimbingan Teknis Intelijen 2025 yang mengintegrasikan narasumber dari akademisi, aparat intelijen negara, dan birokrasi selayaknya menjadi agenda rutin agar menumbuhkan kesadaran dan memberi secercah harapan untuk bersama-sama membenahi defisit kapasitas dibidang intelijen ekonomi.

Pada akhirnya, pembelajaran dari praktik internasional, seperti Singapura, Irlandia, dan Jepang, serta realitas daerah di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan intelijen ekonomi bergantung pada integrasi kebijakan lintas sektor dan kemampuan negara atau daerah dalam mengoordinasikan respons secara cepat dan presisi (Armstrong & Urata, 2023; O’Leary, 2015). Dalam konteks Indonesia, inisiatif seperti Bimbingan Teknis Intelijen Badan Kesbangpol Kota Bandung justru menjadi langkah awal yang penting dan sangat strategis untuk menutup kesenjangan kapasitas intelijen ekonomi di tingkat daerah.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Intelijen ekonomi merupakan instrumen strategis yang menentukan kemampuan daerah dalam menjaga kedaulatan dan meningkatkan daya saing daerah di tengah persaingan geoekonomi global. Dalam dunia yang semakin tanpa batas namun penuh sekat persaingan, kemampuan sebuah daerah untuk mengetahui dirinya sendiri, memahami lingkungannya, dan mengantisipasi masa depan adalah pembeda antara menjadi pemimpin atau pengikut, antara menjadi subjek yang berdaya atau objek eksploitasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa absennya sistem intelijen ekonomi yang terintegrasi menyebabkan daerah rentan terhadap guncangan eksternal dan kehilangan peluang pembangunan. Revitalisasi peran Badan Kesbangpol sebagai SSP pemerintahan daerah memungkinkan terbentuknya mekanisme koordinasi dan analisis informasi strategis yang lebih efektif. Tanpa Intelijen Ekonomi, daerah “buta” terhadap ancaman dan peluang global, rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan guncangan eksternal. Mekanisme yang efektif bukanlah sekadar pengumpulan data statistik, melainkan siklus intelijen utuh yang mencakup *surveillance* (deteksi dini tren), *security* (perlindungan aset), dan *influence* (pemasaran wilayah).

Model *Dodeca-Helix* yang menghasilkan “kecerdasan kolektif”, terbukti relevan sebagai kerangka kolaborasi yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor pembangunan daerah dalam satu ekosistem intelijen. Melalui interaksi yang sinergis, model ini menghasilkan kecerdasan kolektif yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis berbasis bukti. Badan Kesbangpol, ketika direvitalisasi sebagai Sistem Saraf Pusat, dapat diandalkan untuk menjadi koordinator vital dalam ekosistem intelijen ekonomi daerah.

4.2. Rekomendasi

Dalam kerangka pelebagaan fungsi intelijen ekonomi daerah, akselerasi transformasi, penguatan, dan revitalisasi peran institusional Badan Kesbangpol, direkomendasikan: (1) Pelebagaan Unit Intelijen Ekonomi Strategis non-struktural di bawah Kepala Daerah dengan mandat “Satu Data” yang ketat sebagai realisasi SSP intelijen ekonomi di daerah; (2) Implementasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Plus yang memperluas keanggotaan Forkopimda tradisional dengan memasukkan Rektor Universitas, Ketua Kadin, dan tokoh inovator disertai Pembentukan Laboratorium Inovasi sebagai ruang pertemuan 12 aktor helix sebagai upaya operasionalisasi model *Dodeca-Helix* dalam mendukung fungsi intelijen ekonomi; (3) Audit Aset Strategis dan pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Daerah yang secara spesifik bertugas dalam rangka keamanan ekonomi daerah; (4) Adopsi teknologi AI untuk peramalan ekonomi dan *Digital Twin* untuk simulasi kebijakan didukung Diklat intensif bagi aparatur dalam *Data Science* dan *Strategic Foresight* sebagai strategi transformasi; dan (5) Kemitraan data dengan sektor swasta melalui mekanisme *Data Philanthropy*.

Transformasi ini tidak mudah, karena menuntut keberanian dan komitmen politik yang harus disertai investasi sumber daya manusia dan budaya kolaborasi yang konsisten dalam tata kelola pemerintahan daerah. Namun, situasi dan kondisi di berbagai belahan dunia membuktikan bahwa daerah yang menguasai Intelijen Ekonomi adalah daerah yang memegang kunci kemakmuran bagi warganya. Bagi Indonesia, momentum untuk memulai transformasi ini adalah sekarang—di era di mana Badan Kesbangpol Kota Bandung mulai bangkit dan membuktikan kesadaran untuk mengintegrasikan intelijen ekonomi dalam program kerja strategisnya.

Referensi

- Adami, C. (2019). Economic Intelligence: Modern Concept. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. *Economics*, (207), 13–21. <https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/207-6/2>
- Almubaroq, H. Z., Sulistiyanto, Asmoro, R. D., Purwantoro, S. A., Duarte, E. P., Yanto, S., Perwita, A. A. B., Hartono, U., Lelyana, N., Susanto, Tarigan, H., Saptono, E., & Dewanto, H. (2025). *Mengelola Ketidakpastian: Strategi Pertahanan di Tengah Dinamika Global*. Indonesia Emas Group.
- Aminah, S., & Saksono, H. (2021). Digital Transformation of the Government: A Case Study in Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(2), 272–288. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3702-17>
- Armstrong, S., & Urata, S. (2023). *‘Japan First’? Economic Security in a World of Uncertainty*. ANU Press.

- Balanda, A., & Cherniak, A. (2022). Economic Intelligence and Counter-Intelligence in Ensuring National Economic Interests: Theoretical and Applied Aspect. *Úridičnij Časopis Nacional'noi Akademii Vnutrišnih Sprav*, 12(3), 17–29. <https://doi.org/10.56215/04221203.17>
- Broström, A. (2011). The Triple Helix: University–Industry–Government Innovation in Action – By Henry Etzkowitz. *Papers in Regional Science*, 90(2), 441–442. <https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2011.00357.x>
- Chiru, I., & Ungureanu, G. T. (2021). Economic Intelligence. In Search of a Conceptual Framework. *Strategic Impact*, (78), 102–117.
- Dima, A. M. (2021). Resilience and Economic Intelligence through Digitalization and Big Data Analytics. *Amfiteatru Economic*, 23(S15), 896. <https://doi.org/10.24818/EA/2021/S15/896>
- García-Madurga, M.-Á., Grilló-Méndez, A.-J., & Esteban-Navarro, M.-Á. (2020). Territorial Intelligence, a Collective Challenge for Sustainable Development: A Scoping Review. *Social Sciences*, 9(7), 1–21. <https://doi.org/10.3390/socsci9070126>
- Hicham, B., & Hamza, D. T. (2025). The Relationship of Economic Intelligence in Economic Institutions to Digital Transformation Read in Saudi Arabia's Vision 2030 Experience the Extent to Which Algeria Has Benefited. *Journal of Economic and Financial Research*, 12(1), 720–747. <https://asjp.cerist.dz/en/article/273280>
- Hind, B., & Outmane, S. N. (2024). Economic Intelligence and Scientific Innovation: A Synergy Model for Competitiveness and Sustainability. *Revue Internationale de la Recherche Scientifique*, 2(2), 582–588. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10982055>
- Kapitsinis, N., Munday, M., & Roberts, A. (2021). Exploring a Low SME Equity Equilibrium in Wales. *European Planning Studies*, 29(10), 1777–1797. <https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1882945>
- Marín, M. A. F.-V. (2025). The “New Economic Warrior”: An Analysis of the Use of Economic Intelligence and Cyber Intelligence in National Security Through Economic Warfare, Economic Defence, and Defence Economics. Dalam *Springer Nature* (hlm. 67–77). https://doi.org/10.1007/978-981-96-0235-3_6
- Mostaque, E. (2025). *The Last Economy A Guide to the Age of Intelligent Economics*.
- Nuryana, & Junaidi. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(2), 356–383. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5266>
- O’Leary, E. (2015). *Irish Economic Development: High-performing EU State or Serial Under-achiever?* Routledge.
- Saksono, H. (2012). Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 04(02), 93–104. <https://doi.org/10.21787/JBP.04.2012.93-104>
- Saksono, H. (2019). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sebagai Think Tanks dan Akselerator Perubahan Peradaban di Era Digital. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14, 1–18.
- Saksono, H. (2020). Innovation Hub: Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah Inovatif. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), 1–16. <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7854>
- Saksono, H. (2024). Inclusive Strategies to Bridge the Digital Gap: A Case Study of 9 Archipelago Provinces in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(3), 629–638. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.629-638>
- Saksono, H. (2025). Sisi Ekonomi Inovasi Daerah: Model Terintegrasi Komersialisasi dan Monetisasi untuk Kemandirian Fiskal Daerah. *Matra Pembaruan*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.21787/mp.9.1.2025.1-16>
- Saksono, H., Humalangi, M., Lantapon, N., & Butolo, I. (2023). The Role of Economic Intelligence in Accelerating Welfare of Gorontalo Province. *Jurnal Bina Praja*, 15(3), 543–556. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.543-556>
- Saksono, H., & Utami, K. J. (2024). Ekonomi Biru: Profil Kekayaan Laut dan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Kepulauan Sulawesi Tenggara (2019–2023). *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, 6(2), 139–150. <https://jurnal.kainawa.id/index.php/knw/article/view/82>
- Seiglie, C., Coissard, S., & Échinard, Y. (2008). Economic Intelligence and National Security. Dalam *Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development* (hlm. 235–248). Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development. [https://doi.org/10.1016/S1572-8323\(08\)06014-1](https://doi.org/10.1016/S1572-8323(08)06014-1)
- Squalli, J., & Wilson, K. (2014). Intelligence, Creativity, and Innovation. *Intelligence*, 46(1), 250–257. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2014.07.005>
- Wijaya, T., & Jayasuriya, K. (2024). A New Multipolar Order: Combined Development, State Forms and New Business Classes. *International Affairs*, 100(5), 2133–2152. <https://doi.org/10.1093/ia/iaae135>